

ASBTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis dan mengkritisi serta memahami pengaturan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang melakukan kawin siri dalam perspektif perundang-undangan; 2) untuk menganalisis dan mengkritisi serta memahami sanksi bagi PNS Wanita yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dalam kasus kawin siri terhadap perspektif keadilan ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi, interpretasi dan sistematika norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pada prinsipnya terkait dengan izin perceraian dan perkawinan berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di dalamnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya maka setiap Pegawai Negeri Sipil diharuskan memahami peraturan perundang-undangan yang mengikatnya, termasuk di dalamnya peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat beristri lebih dari satu ini terdapat perbedaan dalam permohonan izinnya, akan tetapi harus beralasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun demikian sebaliknya jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan dan dinyatakan batal demi hukum; 2) terjadinya peristiwa pelanggaran pernikahan siri yang dilakukan oleh PNS yang berinisial MI dan S yang bekerja di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi. Implikasi hukum pada analisis peristiwa hukum diatas adalah ketidakadilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil wanita atas penjatuhan hukuman disiplin yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada S sementara Pegawai Negeri Sipil pria hanya dijatuhkan penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun saja, dengan dalil bahwa tidak ada aturan atau norma hukum khusus dan tidak jelas yang memberikan konsekuensi atau akibat hukum berupa sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

Kata kunci : Hukuman Disiplin, Izin Perkawinan dan Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.

Imposing Disciplinary Punishments of Respectful Dismissal in Marriage Permit and Divorce Cases for Civil Servants From the Perspective of Legal Justice

ABSTRACT

This study aims: 1) to analyze, criticize, and understand the regulation of marriage and divorce permits for civil servants who have unregistered marriages from a legal perspective; 2) to analyze, criticize, and understand the sanctions for female civil servants who are honorably dismissed not at their own request in unregistered marriage cases from a justice perspective in terms of legal regulations. The research method used in this paper is the normative juridical legal research method and the approaches used are the conceptual approach, the legal approach, and the case approach. The analysis of legal materials used in this study was carried out by means of inventory, interpretation, and systematics of legal norms related to the problem being studied. The results of this study indicate that 1) In principle, related to divorce and marriage permits are based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants (PNS) including Civil Servant Officials. It should be noted that in carrying out their duties and responsibilities, every Civil Servant is required to understand the laws and regulations that bind them, including written regulations containing generally binding legal norms established by state institutions or authorized officials. The provisions for permission for Civil Servants to be able to have more than one wife are different in their application for permission, but must be clearly justified and in accordance with the provisions stipulated in the Laws and Regulations, however, on the other hand, if the reasons for the divorced Civil Servants do not comply with the provisions above, permission will not be granted by the relevant official and will be declared null and void by law; 2) the occurrence of an incident of violation of unregistered marriage committed by Civil Servants with the initials MI and S who work at the Raden Mattaher Regional Hospital, Jambi Province. The legal implication of the analysis of the legal event above is the injustice received by the female Civil Servant for the imposition of disciplinary punishment, namely honorable dismissal not at her own request to S, while the male Civil Servant was only given a 1 (one) year delay in promotion, on the grounds that there are no special and unclear legal rules or norms that provide consequences or legal consequences in the form of sanctions/disciplinary punishments in accordance with the provisions of the Civil Servant laws and regulations in Indonesia.

Keywords: *Disciplinary Punishment, Marriage and Divorce Permits, Civil Servants.*